

Tersudut Sungai Mati

Pengalaman Perempuan Aceh Menghadapi Krisis Sosial-Ekologis Pasca Konflik

Ciptaningrat Larastiti¹

ABSTRAKSI

Sajogyo Institute pada April 2015 melakukan proses assessment kebutuhan belajar perempuan di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Selatan. Proses tersebut berlanjut melalui ruang-ruang belajar yang dimulai dengan hadirnya seorang peneliti di lokasi tersebut sejak Februari 2016 hingga Desember 2016. Baik di Aceh Utara ataupun Aceh Selatan, pada masa Daerah Operasi Militer hingga Darurat Militer 1982-2005, dikenal sebagai wilayah dengan ketegangan konflik tinggi. Situs kuburan masal berdiri berdampingan dengan konsesi besar minyak-gas dan perusahaan hutan. Tragedi berdarah yang menjadi penanda perampasan ruang hidup masyarakat Aceh menyisakan trauma panjang bagi para perempuan. Sedikit dari mereka yang ikut angkat senjata, selebihnya berada di dalam rumah, melindungi anak-anak dan terancam kelaparan. Tahun 2005 menjadi penanda perjanjian damai Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Pasukan berseragam dan bersenjata tak lagi berkeliling dari rumah ke rumah, suara baku tembak dan bom tak lagi terdengar, namun situasi krisis tetap merangsek ke dinding-dinding dapur mereka. Konflik menyisakan kegetiran dan kemiskinan lantaran hajat hidup dan tatanan sosial yang rusak. Saya menggunakan istilah “sungai mati” sebagai penanda ambang batas krisis yang sehari-hari dirasakan masyarakat terutama perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan air. Perempuan, terutama mereka yang menjadi janda, mau tidak mau bertugas sebagai tulang punggung keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup. Di sini, saya akan menceritakan pengalaman perempuan yang berjuang di tengah krisis sosial-ekologis demi menjamin kelangsungan hidupnya.

PENDAHULUAN

Kali pertama menginjakkan kaki di Bandara Malikussaleh Kota Lhoksumawe, saya diajak Keumala² –peneliti Sajogyo Institute– melintasi Jalan Banda Aceh-Medan yang riuh oleh pemandangan tanki-tanki PT. Arun NGL Co. dan cerobong asap pabrik PT. Pupuk Iskandar Muda. Sebelum melewati kedua perusahaan itu, kami melalui Simpang PT KKA (Kertas Kraft Aceh) terlebih dulu. Sebuah monumen bertuliskan nama-nama korban menjadi tanda bagi tragedi kemanusiaan masyarakat Aceh 03 September 1999 silam. “Sebuah tragedi penembakan brutal yang dilakukan anggota TNI Kesatuan Yonif 113 dan Den Rudal 001/Lilawangsang, ... mengakibatkan 39 orang meninggal dan 125 orang mengalami luka tembak,” (Majalah Aceh Kontras). Ternyata pengalaman ini hanya halaman pembuka dari serangkaian perjalanan menuju Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Di atas motor, Keumala terus bercerita tentang

¹ Peneliti Sajogyo Institute

² Seluruh nama kawan bercakap-cakap dalam perjalanan saya di Aceh sengaja saya ganti.

situs-situs kekerasan ketika Aceh berstatus Darurat Sipil dan Darurat Militer. Saat melewati Desa Kandang, ia mengisahkan bagaimana Ahmad Kandang yang selalu dilindungi para perempuan Aceh dan kebal peluru pada akhirnya terbunuh peluru emas tentara. Demikian pula ketika kami melewati Puskesmas Pantan Labu, ia bercerita bahwa jenazah almarhum suaminya yang ditembak tentara ditemukan di sana.

Cerita getir Keumala hari itu mengawali satu babak proses belajar sebagai perempuan Aceh untuk memahami pengalaman hidupnya sebagai bagian dari krisis sosial ekologis. Saya bertemu dengan Keumala dan seorang perempuan Aceh lain bernama Meutia dalam proses belajar bertajuk Beasiswa Studi Agraria dan Perempuan. Kegiatan ini mengajak para peneliti untuk tinggal di kampung antara lain Mukim Rampah di Kabupaten Aceh Utara dan Mukim Manggamat di Kabupaten Aceh Selatan. Upaya belajar ini bukan proses belajar, para peneliti perempuan ini harus berjuang mengatasi trauma dalam diri masing-masing.

“Bagaimana bisa saya bercerita soal krisis yang dialami saudara-saudara perempuan saya di Gampong Buket Linteung sementara saya adalah bagian dari krisis tersebut, melawan ketakutan dan kemudian menuliskan rentetan perubahan lanskap yang ternyata sangat erat hubungan dengan masa lalu yang kelam,” (Catatan Keumala, 2016: tidak dipublikasikan).

Proses belajar yang telah berlangsung empat bulan ini, secara mengejutkan, justru menghadirkan data perjuangan sehari-hari perempuan pasca konflik dalam menghadapi kebutuhan air bersih, pangan, hingga banjir. Padahal selama ini, pemberitaan tentang Aceh di media massa tak lepas dari perdebatan mengatur tubuh perempuan dalam ragam peraturan daerah syariah. Seringkali berita demikian justru menyembunyikan krisis yang sebenarnya dihadapi perempuan Aceh. Tanpa menampilkan pengalaman perempuan Aceh dalam sejarah krisis ruang hidupnya, termasuk pandangan dan harapan mereka terhadap masa depan Aceh, maka Aceh mengulang pengalaman krisis provinsi lain.

Makalah ini ingin menuturkan pengalaman perempuan Aceh pada masa konflik dan pasca konflik sebagai sedimentasi krisis sosial ekologis yang makin tebal. Konflik Aceh, menurut Kell (1995), salah satunya dipicu oleh rejim ekstraksi proyek-proyek migas di mana seluruh keuntungannya tersedot ke Jakarta. Aparat berseragam loreng mondar-mandir di kampung melayani dan mengamankan laju akumulasi kapital untuk ekspor migas. Ketegangan ini berlangsung lama bahkan sebelum status Daerah Operasi Militer hingga Darurat Militer diberlakukan. Kehendak politik negara dijalankan secara teknis melalui operasi keamanan dan pendirian pos-pos militer. Operasi tersebut berjalan melalui tindakan kekerasan seperti pembakaran rumah, penangkapan, penahanan, penyiksaan hingga penghilangan nyawa terhadap mereka yang dituduh anggota GAM atau keluarga GAM (Kontras, 2006). Semua dilakukan tanpa jalur pengadilan. Situasi pasca konflik, saat MoU Helsinki ditandatangani, ternyata tidak mengubah wajah rejim ekstraksi sebelumnya. Kondisi damai memang tak lagi menampilkan pos-pos militer di setiap simpang jalan. Namun, situasi damai sarat limpahan dampak rejim

ekstraktif. Sungai tak lagi berfungsi, banjir, tanah tak subur, dan pencemaran. Gambaran ini terlihat dari pengalaman perempuan di dua situs belajar.

Di bagian pertama makalah ini, saya ingin menggambarkan wajah krisis sosial ekologis yang ditemui di Mukim Rampah dan Mukim Manggamat. Proses perubahan kampung didorong praktik teritorialisasi negara yang menggeser ruang hidup masyarakat menjadi ruang pembesaran kapital. Saya menggunakan istilah sungai mati sebagai metafora dari ambang batas kritis yang dialami perempuan Aceh. Di bagian kedua, saya ingin menjelaskan pengalaman perempuan dalam menghadapi krisis di setiap babak pembuka rejim ekstraksi pada masa sebelum konflik, saat konflik dan pasca konflik. Pengalaman ini dipaparkan dalam tiga cerita. Pertama, pengalaman perempuan menghadapi seragam loreng baik tentara dan GAM. Kedua, pengalaman perempuan dan akses terhadap air yang makin sulit seiring dengan degradasi sungai oleh rejim ekstraksi di kampung mereka. Ketiga, pengalaman perempuan menghadapi keputusan politik pasca konflik yang cenderung maskulin termanifestasikan melalui Komite Peralihan Aceh.

WAJAH KRISIS SOSIAL EKOLOGIS

Sejarah Mukim Rampah Kabupaten Aceh Utara dan Mukim Manggamat Kabupaten Aceh Selatan tak bisa lepas dari tuturan-tuturan tentang rejim ekstraksi yang didorong melalui proses teritorialisasi. Teritorialisasi, mengutip Sack dalam Wadley (2003), merupakan upaya individu atau grup untuk mempengaruhi atau mengontrol orang, fenomena dan ragam hubungan didalam teritori tertentu. Artinya, konsep ini berkaitan erat dengan kontrol sumber daya alam dan subyek politik. Prosesnya sendiri didorong oleh negara dengan membuat demarkasi terhadap teritori tertentu, melakukan klaim terhadap sumber daya sebagai properti negara di bawah satuan yuridiksi tertentu, dan seringkali disertai patroli polisi atau militer (Peluso dan Vandergeest, 2001). Pemerintah melakukan kontrol terhadap ruang yang abstrak dengan membebaskan pajak, memonopoli sumber daya strategis seperti migas hingga memberikan konsesi-konsesi. Melalui cara itulah, negara bisa memberi legitimasi terhadap akses dan eksklusi orang yang ada di sekitarnya (Vandergeest dan Peluso, 1995).

Langgam teritorialisasi yang dilakukan negara tidaklah tunggal. Ia bergantung pada babak politik dan dinamika subyek politik. Dalam konteks Aceh, setidaknya, ada tiga babak politik yang bisa ditandai yakni sebelum konflik, semasa konflik, dan pasca konflik. Saya sepakat dengan Kell (1995), konflik terjadi karena, “eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan pemerintah pusat, stagnansi ekonomi di provinsi, sentralisasi pengaturan politik yang melayani perampasan hak milik, dan perubahan sosial yang membuat masyarakat Aceh kehilangan pimpinan tradisional mereka.” Pada masa Orde Baru, perluasan kapital dari rejim ekstraksi migas dan revolusi hijau dihadirkan dengan intervensi militer. Wajah pembangunan muncul sebagai wajah kekerasan. Seluruh masalah bercampur aduk sehingga membuka jalan bagi gerakan militer rakyat yang dideklarasikan Hasan Tiro sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Sementara pasca konflik, wajah krisis menyublim menjadi oligarki lokal pada masa otonomi khusus Aceh yang tidak memutus rantai konsesi-konsesi ekstraktif. Oligarki lokal membentuk kelindan kuasa dari dua lembaga yang ada di kampung yakni Komite Peralihan Aceh dan

pemerintahan formal untuk memudahkan –dalam kasus ini– laju ekstraksi pertambangan biji besi dan emas.

Saya berargumentasi bahwa rejim ekstraksi tidak berubah meski Aceh sudah dianggap damai sejak MoU Helsinki dan pelucutan senjata GAM 2005. Pendapat ini ingin saya tuturkan melalui cerita dua mukim yakni Mukim Rampah di Kabupaten Aceh Utara dan Mukim Manggamat di Kabupaten Aceh Selatan. Riset etnografi multi-situs memungkinkan saya untuk mengkonstruksi data dengan melihat benang merah dari dua situs belajar yang terhubung melalui metafora “sungai mati”.³ Di Mukim Rampah, istilah sungai mati memiliki pengertian denotatif yang menggambarkan kondisi air sungai tidak lagi mengalir dari hulu ke hilir. Sementara di Mukim Manggamat, sungai mati bermakna konotatif lantaran kondisi sungai yang terdegradasi, makin dangkal, dipenuhi batuan dan mengandung racun limbah pertambangan, sehingga tak layak pakai.

Istilah sungai mati hadir lantaran proses penguasaan sumber daya yang timpang. Di Mukim Rampah, tepatnya di Gampong Bukit Linteung, masyarakat menggunakan air sungai mati untuk mandi dan cuci. Sungai itu menjadi satu-satunya sumber air yang diakses warga gampong sekalipun Bukit Linteung dikelung sungai-sungai dan bukit-bukit. Sumur-sumur sudah mengering bersamaan dengan intensitas banjir yang makin tinggi di Bukit Linteung. Tak banyak rumah-rumah yang mampu mengakses air bersih dari sumur bor yang jauh dari sumber limbah.

Cerita tentang sungai mati juga tidak bisa lepas dari sejarah teritorialisasi di Mukim Rampah pun dengan Aceh Utara. Setidaknya, saya menandai ada tiga bentuk teritorialisasi yang hadir nyaris bersamaan dan mengepung ruang hidup Bukit Linteung. Di hilir aliran Sungai Arakundo yang menjadi induk sungai mati terdapat Dam Langkahan –dulunya dikenal Dam Tanah Jambo Aye. Pembangunan dam menandai jejak teritorialisasi Aceh sebagai lumbung padi Indonesia sejak 1969 (Kell, 1995). Lahan-lahan yang dialiri saluran irigasi Dam Langkahan digenjot agar lembah-lembah di Kecamatan Langkahan mampu menanam padi dengan masa tanam dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Pada tahun 1985, seiring Dam Tanah Jambo Aye dioperasikan pada 1982, sawah-sawah produktif di Kecamatan Tanah Jamb Aye meningkat sampai 2.098 hektar (Diederer, 1985). Selain pembangunan Dam Langkahan di hilir Sungai Arakundo, Bukit Linteung juga dikelung tanggul yang menandai konsesi 20.000an hektar perkebunan sawit PTPN I Medan di Cot Gireuk dan Perkebunan Inti Rakyat para transmigran di Gampong Seureuke pada 1990. Lain halnya dengan hulu sungai mati yakni Sungai Rampah. Hulu Sungai Rampah berada di pipa rig pengeboran gas alam cair yang pada tahun 1975 dioperasikan oleh PT Mobil Oil Indonesia.

Saya pun teringat Bang Mahmud, seorang eks kombatan di Mukim Rampah, yang mengajak saya dan Keumala pergi ke lapangan gersang di ujung kampung. Lapangan itu tidak diniati sebagai wahana bermain sepak bola. Ia menjadi ada karena sengaja ditinggalkan usai eksplorasi gas alam cair yang dinyatakan gagal oleh PT Mobil Oil Indonesia pada 1973an.

³ Riset etnografi multi-situs memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi analisisnya dengan “mengikuti-merunut orang, komoditas, metafora, plot atau alur,” (Marcus, 1995). Oleh karenanya, ia terbebas dari pendekatan etnografi klasik yang harus berpatok pada satu situs sehingga menghasilkan observasi yang mendikotomikan antara lokal dan global, ekonomi tradisional dan ekonomi kapitalisme.

Lambat laun, lapangan di ujung kampung menjadi pejal, gersang, penuh ilalang dan pangkal-pangkal pohon kecil yang terbakar. Di sana-sini pipa bekas terbakar berserakan, sementara galian jalur pipa tak ditimbun lagi. Bang Mahmud berkata, banyak rumor di masyarakat tentang lapangan ini. Salah satunya bahwa jauh di bawah lapangan terdapat timbunan limbah gas alam cair PT Mobil Oil Indonesia Indonesia. Sulit untuk membuktikan hal itu. Namun, rumor tersebut terus berputar di kampung menimbulkan kekesalan dan kesia-siaan terhadap lahan yang dulunya kebun pinang dan coklat. Sementara kebun-kebun garapan masyarakat di sekitar lapangan bekas eksplorasi menyisakan tanda pencemaran, tanaman coklat berbatang hitam dengan buah ikut menghitam.

Tak jauh dari lapangan gersang, hanya dua kilometer saja, berdirilah rig pengeboran gas alam cair di sebuah bukit yang menjadi hulu Sungai Rampah. Bukit Tengkorak, demikian nama bukit itu. Setiap orang di Bukit Linteung, terutama para eks kombatan, selalu merinding mendengarnya. Bukit itu bukan hanya menjadi penanda bagi rig pengeboran gas alam cair PT Mobil Oil Indonesia yang pada 2002 menjadi PT Exxon Mobil Indonesia. Menurut Bang Muhadjir, seorang eks kombatan, tak ada yang berani datang ke Bukit Tengkorak lantaran bukit itu dikenal sebagai tempat penculikan bagi mereka yang dituduh GAM dan *cuak*. Tidak ada yang kembali ke rumah setelah diculik di sana. Sebagian lainnya mengenal Bukit Tengkorak sebagai ladang pembantaian, dengan lubang buaya sebagai tempat pembuangannya.

Wajah Bang Muhadjir menjadi pucat ketika saya meminta dia dan Bang Mahmud untuk mengantar ke bukit tersebut. Dia diam tidak menolak, tidak pula mengiyakan. Meskipun Bang Muhadjir menganggap ide itu gila, Bang Mahmud tetap bersedia mengantar saya dan Keumala ke sana. Untuk menghalau rasa takutnya, Bang Mahmud mengajak Kepala Dusun. Sementara, Kepala Dusun berlanjut mengajak seorang tentara dari Komando Daerah Militer Iskandar Muda yang sedang tinggal di Bukit Linteung. Sebuah perjalanan yang tidak biasa, satu sama lain hening tanpa banyak bicara. Kami melewati bukit-bukit yang sudah dibuka sebagai lahan garapan, sawah dan jagung, setelah konflik usai. Walau tidak sesenyap dahulu, seperti ingatan Bang Mahmud, Bang Muhadjir dan Keumala, namun rasa takut itu masih membekas. Sepanjang jalan, Keumala meminta saya untuk bercerita agar meredam rasa takutnya. “Tanganku gemetar Laras, tolong kamu terus ngomong ya,” ucapnya gusar membuat saya kehilangan kata-kata.

Rasa takut Bang Mahmud, Bang Muhadjir, Keumala dan juga Kepala Dusun bukan tanpa alasan. Nama Bukit Tengkorak merupakan salah satu lokasi yang ditandai Kontras dan Komnas HAM (Kontras, 2006) sebagai kuburan massal. Cerita serupa juga muncul dalam Laporan Khusus Tempo⁴ yang juga menyebut Bukit Tengkorak seperti ladang pembantaian di Kamboja. Selain itu, bukan kebetulan juga bila penyebutan Bukit Tengkorak selalu bersandingan dengan Simpang Lima. Bukit Tengkorak hanya berjarak satu kilometer saja dari Pos Militer Simpang Lima. Pos ini berada tepat di jalan masuk menuju bekas kawasan PT Exxon Mobil di Mukim Rampah.⁵ Menurut tuturan yang sering saya dengar dari warga Bukit Linteung, Pos Militer

⁴ Lihat, <http://tempo.co.id/ang/min/03/23/lapsus.htm> diakses pada 27 Mei 2016 pukul 18.00.

⁵ Setidaknya terdapat 7 pos keamanan dari Korem 115 Aceh Singkil, mulai dari Aceh Utara hingga ke Lhokseumawe. Pos-pos tersebut adalah di lokasi tower yaitu Abo-Abo, Simpang Rimba Karya, Simpang Cot Girik,

Simpang Lima sudah ada sejak tahun 1990an. Tepat satu tahun setelah status Daerah Operasi Militer berlaku. Bahkan, menurut catatan Kontras (2006), PT Exxon Mobil mengeluarkan hampir lima milyar rupiah setiap bulan untuk dana operasional tentara dan polisi yang bertugas di sekitar kawasan konsesinya.

Kehadiran PT Mobil Oil Indonesia, selanjutnya disebut PT Exxon Mobil Indonesia, dalam eksploitasi gas alam cair –salah satunya di Mukim Rampah– tidak lepas dari politik teritorialisasi Orde Baru untuk membentuk Zona Industri Lhoksumawe (ZILS). Perubahan itu terjadi begitu pesat, sejak PT Mobil Oil Indonesia menemukan cadangan gas alam cair di Aceh Utara –tepat di atas kawasan yang pada Abad 14 dikenal sebagai Kerajaan Samudra Pasai (Kell, 1995). Pemenuhan energi dari eksploitasi dan pengolahan gas alam cair inilah mengundang pertumbuhan industri lain seperti PT KKA (1985), PT Pupuk Iskandar Muda (1982), dan PT Asean Aceh Fertilizer (1981). Hadirnya zona industri yang terintegrasi seperti ZILS membawa daya rusak besar bagi kawasan-kawasan di pinggiran konsesi perusahaan, salah satunya Mukim Rampah.

Seperti namanya, nama Rampah pada Mukim Rampah berasal dari aliran sungai. Beberapa gampong yang berada di sekitar aliran Sungai Rampah masuk menjadi Mukim Rampah. Sungai Rampah sendiri berhulu di Bukit Tengkorak, tepat di samping rig pengeboran gas alam cair PT Exxon Mobil Indonesia. Sungai itu pula yang setiap hari mengalir hingga ke sungai mati yang setiap hari digunakan untuk mandi dan mencuci. Beberapa warga Bukit Linteung menandai, setidaknya, hulu Sungai Rampah pernah mengalami tiga kali pencemaran limbah akibat kebocoran pipa rig pada 1985, 1999 dan 2007.

Segala material limbah, mulai dari merkuri, timbal, hidrokarbon, mengendap selama bertahun-tahun seiring dengan pembentukan sedimentasi hingga menutup aliran sungai mati. Proses sedimentasi Sungai Arakundo terjadi sejak Dam Langkahan dioperasikan pada 1982, dan diperparah oleh hulu sungai yang telah dikonversi menjadi hutan tanaman industri PT KKA sejak 1985. Dam Langkahan, di mata orang Bukit Linteung, ialah musabab utama dari pendangkalan sungai yang berujung pada intensitas banjir di kampung.

Dam Langkahan hadir sebagai bagian dari upaya teritorialisasi Orde Baru untuk mendukung Revolusi Hijau. Menurut Bakker (2010), proyek pembangunan dam skala besar di abad 20 merupakan prioritas pembangunan infrastruktur air yang didorong oleh Bank Dunia. Infrastruktur yang harus dibayar dengan dampak sosial dan lingkungan sangat tinggi ini menjadi penyokong proses industrialisasi di kota sekaligus desa. Salah satunya adalah penyokong intensifikasi pertanian yang ditandai dengan industrialisasi input pertanian dan sarana produksi tani di mana petani kecil dilemahkan kemampuannya untuk mencukupi produksinya (Jan Douwe van der Ploeg, 2013). Pembangunan dam sejak tahun 1975 hingga 1982 dilakukan beriringan dengan pembangunan saluran irigasi. Hanya saja, pembangunan dam dan saluran irigasi ini, meminjam istilah Teungku Rayeuk mengorbankan satu kampung untuk pembangunan sawah-sawah Aceh Utara dan Aceh Timur. Bukit Linteung dikepung oleh tanggul dan bukit, sementara

di hilirnya telah dibangun dam dengan pengaturan air dari pemerintah. Kondisi gampong yang seperti ember mengakibatkan intensitas banjir meningkat.

Banjir bandang, pada tahun 1985 dan 1987, terjadi hingga setinggi tujuh meter karena aliran Sungai Arakundo dipindah lantas dibendung dam. Menurut Teungku Rayeuk, pembebasan lahan dilakukan sejak 1975 kepada tujuh belas pemilik lahan seluas 22 hektar untuk memindahkan aliran Sungai Arakundo. Pembebasan lahan tidak berjalan lancar, lantaran kebun-kebun pinang dan kopi dibeli murah pemerintah untuk ditenggelamkan. Salah satu pemilik lahan yang menentang biaya ganti rugi ialah Teungku Rayeuk, sementara enam belas lainnya menerima bayaran karena tidak mau berurusan dengan aparat keamanan. Ketika dam dibangun pada tahun 1975 hingga 1982, Teungku Rayeuk masih bisa memanen pinang dan kopi miliknya. Ia mau tidak mau harus melepaskan lahan kepada kontraktor karena hanya lahan satu hektar miliknya saja yang tersisa. Pilihannya pada waktu itu, menerima atau tidak menerima uang ganti rugi dengan resiko kebun tetap ditenggelamkan menjadi sungai.

Teungku Rayeuk dan masyarakat Bukit Linteung, sedari awal dibangunnya dam, sudah memperkirakan resiko banjir. Tahun 1991 dan 1995, banjir kembali datang dengan tinggi 3,5 meter. Disusul kemudian tahun 2005, banjir kembali datang dengan tinggi 4,5 meter. Dampak banjir akibat pembangunan dam membuat Dinas Pekerjaan Umum memberi penawaran ganti rugi kebun dan tanaman kepada masyarakat. Pada 1988, pemerintah menawarkan ganti rugi kepada pemilik tanah di bantaran sungai dengan ketinggian tanah lebih dari 16-18 derajat di atas permukaan sungai. Jumlah ganti rugi dihitung 250 rupiah per meter. Hingga makalah ini ditulis, para pemilik tanah di area terdampak banjir mengaku belum menerima uang ganti rugi. Sementara, banyak diantara tetangga pemilik tanah merasa tidak adil karena ganti rugi banjir tidak merata sementara banjir dialami seluruh warga Bukit Linteung.⁶ Banjir ini juga mengakibatkan abrasi di pinggir Sungai Arakundo yang telah beralih menjadi kebun-kebun sawit. Setiap tahun terjadi pendangkalan, bahkan ketebalan lumpur sungai pada 2015 mencapai 150 centimeter (Khairina, 2015: Tidak diterbitkan). Banjir ini pula yang membuat komoditas kopi di Bukit Linteung menghilang. Kini, delta sungai mati yang dulunya ditanami pohon kopi hanya tersisa ilalang saja.

Wajah krisis di Mukim Rampah didorong oleh daya rusak ZILS semasa teritorialisasi Orde. Potensi gas alam di Aceh Utara tidak bisa dipandang sepele. Pada 1990an, 40% kebutuhan gas alam cair dunia –yang mayoritas berasal dari Aceh Utara– dipenuhi Indonesia dan kebanyakan diperdagangkan ke Jepang, Korea Selatan dan Taiwan (Kell, 1995). Pasca konflik, migas masih menjadi primadona pemerintah daerah. Di tahun 2009-2011, saat PT Exxon Mobil Indonesia menyelesaikan kontrak karyanya dan diambil alih PT Arun NGL Co, migas berkontribusi cukup besar hingga 45% untuk pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara.⁷ Baru-baru ini, pada, Pemerintah Indonesia melantik Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai pengelola asset-aset konsesi migas sebelumnya –berupa pabrik dan sumber daya migas

⁶ Data ini diramu dari dari catatan Keumala dan Laporan Assessment Khairina (2015).

⁷ Laporan riset Pemetaan Sosial Daerah-Daerah Penghasil Minyak dan Gas, <http://migas.bisbak.com/1111.html>, 2012, diakses pada 19 Juni 2015 dalam Khairina (2015)

hingga 12 mill lepas pantai-. BPMA merupakan implementasi ayat 1.3.4 MoU Helsinki, berbunyi,

“Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut territorial sekitar Aceh.”

Kesan distribusi keuntungan sumber daya juga terlihat, terutama, pasca Darurat Militer di Mukim Manggamat Kabupaten Aceh Selatan. Di Mukim Manggamat, saya teringat Bu Dhien, istri eks kombatan GAM, bercerita dengan bangga bahwa pegunungan yang mengepung Mukim Manggamat berisi kandungan emas terbaik. Ia dan suaminya, Pak Cek Nawi, bercerita sembari menunjuk foto dengan latar gunung dan helicopter terpasang di ruang tamu. “Ini pesawat perusahaan untuk cari kandungan emas, alatnya bekerja pake bahasa inggris, saya tidak ngerti,” ucap Pak Cek Nawi. Rasa bangga tersirat ketika ia bercerita tentang dirinya yang kala foto itu diambil sedang bertugas menjaga helicopter dan alat pelacak emas milik perusahaan PT Multi Mineral Utama. Bu Dhien pun menambahkan, “Kata orang perusahaan, di sana –menunjuk Gunung Simpang Tiga dan Gunung Harumbabah – juga ada kandungan batubara.”

Mukim Manggamat adalah kawasan pegunungan yang membentang di sisi selatan Aceh. Seperti namanya, kampung-kampung berdiri di bantaran Sungai Manggamat yang berada di lembah pegunungan. Sungai ini bermuara di sungai besar bernama Sungai Kluet. Mereka yang hidup di bantaran Sungai Kluet mengidentifikasi dirinya sebagai Orang Kluet dan sebagian lainnya Orang Aceh. Identifikasi itu bisa dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan Orang Kluet dan Orang Aceh. Masyarakat Manggamat memberi nama pada gunung-gunung yang ada di belakang rumah-rumah mereka antara lain, Gunung Simpang Tiga, Gunung Simpang Dua, Gunung Mersak dan Gunung Harumbabah. Gunung-gunung ini berada di hulu Sungai Manggamat, yang sejak perusahaan-perusahaan tambang hadir, mengakibatkan intensitas banjir di sekitar kampung meningkat.

Pasca perdamaian, tidak hanya PT Multi Mineral Utama saja yang menginjakkan kaki di Mukim Manggamat. Di atas konsesi yang sama, Bu Dhien dan Pak Cek Nawi mengatakan bahwa “adik perusahaan” PT Multi Mineral Utama yakni PT Beri Mineral Utama juga mengambil batuan Gunung Simpang Tiga. Selain eksplorasi di hulu Sungai Manggamat, tetangga Gampong Simpang Tiga yakni Simpang Dua juga menerima ijin ekstraksi pertambangan. Pada tahun 2009, melalui Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomer 257, PT Pinang Sejati Utama melakukan pengerukan Gunung Simpang Dua di atas lahan-lahan pinang, kopi dan coklat milik masyarakat. Para pemilik lahan diorganisir oleh *geucik* (kepala desa) membentuk koperasi bagi hasil sebagai pembagian keuntungan perusahaan dang anti rugi alih guna lahan. Melalui cara demikian, menurut Pak Puteh, pembagian keuntungan dari perusahaan bisa secara rutin diperoleh.

Berbeda dengan cerita Mukim Rampah dengan PT Exxon Mobil Indonesia, wajah ekstraksi di Mukim Manggamat didorong oleh perusahaan kecil yang mengambil bahan mentah saja. Dengan dalih demikian, maka perusahaan bisa mengambil pertambangan batu dengan ijin

apapun salah satunya biji besi sekalipun emas yang diambil. Rumor bahwa PT Pinang Sejati Utama mengambil emas, membuat DPRK Aceh Selatan menghentikan ijin perusahaannya. Di tahun yang sama, Bupati Aceh Selatan terpilih mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan operasi perusahaan di Gunung Simpang Dua.⁸

Dua setengah tahun operasi alat berat dari perusahaan PT Pinang Sejati Utama dan PT Beri Mineral Utama membuat gunung-gunung menjadi terbuka. Ketika perusahaan masih beroperasi, tidak sedikit masyarakat yang mengakses kawasan konsesi untuk memungut batuan yang mudah diperoleh di atas permukaan tanah. Mereka mengambil batu emas, demikian istilah mereka untuk menyebut bahan mentah emas. Batu-batu ini dibawa ke rumah-rumah yang jaraknya hanya dua sampai empat kilometer saja dari gunung. Batuan ini, selanjutnya, diolah menggunakan teknologi pengolahan emas rumah tangga yang mereka sebut *gelundungan* dengan kebutuhan (Hg) tinggi. Pada mulanya, merkuri-merkuri itu diperoleh dari sales pedagang “obat emas” dari Meulaboh dan Gunung Hujeun Kabupaten Aceh Jaya. Persebaran merkuri berjalan begitu cepat, tidak hanya merkuri baru saja yang diperdagangkan di dalam kampung. Hari ini, penambang bisa membeli merkuri dengan mudah dan murah dari hasil daur ulang pengolahan batu emas pertama yang ada di tokeh-tokeh penampung emas. Para tokeh ini memiliki teknologi *gembos* yang berfungsi memisahkan emas dengan merkuri. Selain menerima jasa *gembos*, memisahkan batuan emas mentah dengan merkuri, para tokeh juga menerima jasa membakar emas mentah dengan pijar (piro borat) untuk memisahkan emas dengan perak.

Tokeh-tokeh emas bukanlah orang lain, melainkan tetangga-tetangga mereka yang mengolah emas skala rumah tangga. Hingga saya melakukan perjalanan minggu lalu ke Mukim Manggamat, saya mampu menemukan lima tokeh emas ditandai dengan alat drum kecil untuk *gembos*. Sebagian dari mereka berani menanamkan modal sehingga mampu meraup keuntungan hingga 10 gram emas per hari. Mereka yang menjadi primadona ini menguasai nyaris sektor hulu dan hilir produksi emas. Para tokeh tidak hanya mengandalkan emas dengan memungut batuan di kawasan konsesi perusahaan, mereka berani meminjam uang untuk berspekulasi menggali lubang emas yang ada di Gunung Mersak, Gunung Simpang Tiga, dan Gunung Simpang Dua.

Selain menggali lubang, mereka yang mampu berspekulasi dengan modal pinjaman bank bisa menginvestasikan uangnya ke teknologi pengolahan limbah emas dari lumpur pertama. Teknologi ini disebut *blender*, berbentuk tabung raksasa setinggi tiga sampai empat meter dengan ujung berbentuk kerucut seperti pensil. Para pengusaha ini mendapatkan bahan baku dari penambang-penambang rumah tangga, di mana harga satu karung tergantung pada kualitas emas pertama yang dimiliki. Teknologi *blender* ini, menurut masyarakat Manggamat, berasal dari Bandung Jawa Barat. Ia adalah Heru, seorang lulusan sarjana institute ternama dan semula bekerja untuk PT Multi Mineral Utama. Ketika perusahaan tutup, ia pun mencari usaha lain salah satunya *blender*. Semakin rumit penggunaan teknologi emas, bahan kimia berbahaya yang digunakan pun makin intensif. Tidak hanya merkuri dan pijar saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan emas dari proses *blender*. Limbah-limbah emas yang sudah mengeras didalam karung harus dicairkan terlebih dulu dengan diaduk bersama air. Teknologi ini membutuhkan

⁸ Khairina, 2015.

debit air tinggi, maka tidak mengherankan bila *blender-blender* ini dibangun di samping sungai. Setelah diaduk, limbah dimasukkan kedalam tabung dan dicampur dengan beberapa jenis bahan kimia lain, hydrogen peroxida (H₂O₂), karbon aktif, natrium sianida (NaCN), dan larutan asam klorida (HCL). Setelah pengolahan produksi selesai, olahan karbon aktif yang mengikat emas ini akan diolah menjadi emas mentah di *gelundungan*. Pengolahan tahap ini, tentu saja, membutuhkan merkuri (Hg). Sisa limbah dengan volume lebih dari 250 liter setiap pengolahan satu tabung dan telah bercampur dengan beragam bahan kimia ini dibuang ke Sungai Manggamat. Teknologi ini dengan cepat menyebar di Mukim Manggamat. Hingga makalah ini dibuat, setidaknya ada empat unit pengolahan *blender* di Mukim Manggamat.

Buangan limbah dari *blender* sekaligus degradasi lahan karena ekstraksi batuan mentah di gunung-gunung mengakibatkan pendangkalan Sungai Manggamat yang berujung banjir. Ikan-ikan mati, dan kegiatan masyarakat di sungai seperti mandi ataupun cuci praktis ditinggalkan. Bu Citra, misalnya, meragukan kualitas air Sungai Manggamat. Ia pernah mendengar, dua kerbau tetangganya mati ketika meminum air buangan limbah *blender*. Ia juga menunjukkan dengan gusar tinggi air banjir yang ada di rumahnya. Banjir terakhir di tahun 2015 mencapai 1,5 meter. Banjir bukan hanya membawa air, tetapi juga material batuan sisa-sisa tambang dan limbah cair ke kampung-kampung.

Wajah krisis Mukim Rampah dan Mukim Manggamat terlihat sama sekalipun periode perusakannya berbeda. Kata kunci yang menghubungkan keduanya adalah ruang hidup sungai. Sungai Manggamat yang semula mengalir sawah dan kebun kopi, menjadi tempat mandi dan cuci bahkan sumber air minum, kini telah tercemar oleh pertambangan biji besi dan emas yang terbuka pasca konflik. Status Darurat Militer pada 2002-2005 hanya momen penunda ekstraksi. Lalu, satu bulan usai perjanjian damai, PT Multi Mineral Utama melakukan eksplorasi emas dengan mempekerjakan sebagian eks kombatan. Sementara perijinan PT Multi Mineral Utama, diikuti dua perusahaan lain, diperoleh dari bupati terpilih Partai Aceh. Sementara di tingkat kampung, Komite Peralihan Aceh menjadi wadah memobilisasi kemudahan-kemudahan perusahaan untuk pembebasan lahan dan distribusi keuntungan. Situasi yang sama juga terlihat dari pengalaman Sungai Rampah. Hingga hari ini, hampir delapan tahun berlalu sejak PT Exxon Mobil angkat kaki dari Mukim Rampah, upaya pemulihan justru tidak pernah dilakukan. Banjir terus berlangsung, sementara sungai-sungai yang penuh endapan timbal, hidrokarbon dan merkuri kian dangkal. Kegetiran itu menjadi begitu tak mengesalkan, saat beberapa orang di Mukim Rampah bercerita, “Enak jadi orang perusahaan yang tinggal di perusahaan Exxon, ada kolam renang di sana. Airnya bersih.”

PENGALAMAN-PENGALAMAN PEREMPUAN

Wajah krisissosial ekologis yang didorong teritorialisasi semasa Orde Baru dan Otonomi Khusus menyisakan kegetiran dalam pengalaman sehari-hari perempuan. Perempuan dalam babak politik apapun menjadi pagar paling depan untuk memastikan satu keluarganya selamat. Semasa konflik, saat suami dan anak-anaknya berlari ke hutan, mereka menjadi tulang punggung keluarga di sela ragam interogasi dari tentara dan GAM. Di sini saya ingin menceritakan tiga pengalaman para perempuan di Mukim Rampah dan Mukim Manggamat. Pertama, saya ingin

bercerita tentang pengalaman perempuan semasa konflik baik pada saat status DOM di Mukim Rampah maupun Darurat Militer di Mukim Rampah dan Mukim Manggamat. Kedua, saya ingin menceritakan pengalaman perempuan di Mukim Rampah dan Mukim Manggamat dalam mengakses air yang tercemar karena desakan rejim ekstraksi. Ketiga, secara khusus, saya ingin menceritakan respon perempuan di Mukim Rampah dengan politik KPA dan perusahaan-perusahaan pertambangan yang datang usai perjanjian damai ditandatangani.

A. Pengalaman perempuan dengan seragam loreng

Sepanjang tinggal di Mukim Rampah dan Mukim Manggamat, cerita perempuan menghadapi kombatan GAM ataupun TNI begitu mudah dituturkan. Mereka menyimpan cerita-cerita getir terlalu lama, tidak tahu harus mengadu pada siapa lantaran hampir setiap orang mengalami hal serupa. Cerita-cerita pembunuhan, penganiyaan dan pelecehan seksual menjadi atribut sehari-hari. Bahkan, saya sempat terkejut, ketika seorang perempuan berusia 50an tahun menegur cucunya yang masih berumur satu setengah tahun dalam bahasa Aceh, “Jangan keluar rumah, nanti dibunuh tentara.” Trauma itu masih tersimpan dalam kalimat itu.

Demikian pula ketika saya bertemu perempuan berusia 35 tahun di Mukim Manggamat, ia menceritakan suaminya yang terbunuh di dalam hutan. Tidak ada air mata, walau aku melihat duka. Suaminya terbunuh saat operasi Darurat Militer. Kopasus masuk dari hulu Sungai Manggamat. Baku tembak pertama antara Kopasus dan GAM menjadi tanda dimulainya status Darurat Militer. Suaminya terpaksa berlari masuk hutan. Sementara ia dan banyak perempuan lain harus pindah dari pengungsian satu ke pengungsian lain untuk melindungi diri. Status sebagai istri kombatan membuatnya terkena wajib lapor ke Pos Militer Simpang Dua. Hingga suatu hari, seorang tentara menghampirinya dan menunjukkan kartu tanda penduduk tanpa warna merah putih. Ia mengerti, tentara sudah menemukan tempat persembunyian suaminya. Satu minggu setelah kejadian itu, seseorang menemukan jenazah suaminya. Ia pun menyudahi ceritanya dan tertegun. Ia kembali meneruskan mengikat kacang panjang untuk dijual ke pasar.

Pengalaman perempuan dengan seragam loreng bukanlah perkara sederhana. Selama konflik, mereka berada di posisi abu-abu, tidak terlibat baku tembak, tidak pula masuk ke dalam hutan. Sebagian besar dari mereka berada di dalam rumah dan memastikan anggota keluarganya tidak kelaparan. Selama konflik, terutama status Darurat Militer, hanya perempuan yang bisa pergi keluar rumah untuk mencari pangan. Mereka mencari celah memanen kebun coklat, membiasakan diri tiarap saat suara tembakan dan bergegas pulang jika baku tembak terjadi. Biasanya tentara melunak pada perempuan. Walau tindakan pelecehan tidak dipungkiri kerap terjadi kepada mereka yang memiliki hubungan kerabat dengan kombatan GAM. Seperti cerita Bu Dhien, istri kombatan, yang sering dipanggil namanya oleh tentara untuk berguling-guling di atas badan jalan pada siang bolong. Terkadang, ia dan para istri kombatan harus menuruti seluruh perintah tentara seperti merendam diri di sungai bila tidak ingin dipukul. Aku bertanya, “Apa yang dilakukan tentara?” Ia pun menjawab, “Ya tertawa, hanya untuk senang-senang saja.”

Suasana tegang Darurat Militer juga dirasakan para lelaki. Seperti dikatakan Pak Cek Nawi, “Tidak ada pilihan lagi, harus ikut salah satu entah jadi kombatan atau *cuak* tentara.” Rasa

takut yang diikuti intimidasi dan terror bagi lelaki usia dewasa membuat suami Bu Rayun bunuh diri di ladang. Bu Rayun mengatakan, keluarganya harus kehilangan kerbau-kerbau dan panen karena diambil kombatan untuk logistik. “Kita menanam, tetapi tidak bisa panen karena terburu dirampas,” kenang Bu Rayun.

Kenangan buruk juga dialami Bu Rahmi. Setelah status DOM ditarik tahun 1999, kaderisasi GAM kian meluas, bergerak dari Tapak Tuan hingga Mukim Manggamat. Suaminya sempat diangkat sebagai panglima sago GAM. Namun lantaran memiliki pandangan berbeda tentang cara memobilisasi logistik organisasi, ia memutuskan mengundurkan diri. Ternyata keputusan tersebut berbuah penculikan, terjadi intimidasi agar suami Bu Rahmi tidak menjadi *cuak* tentara. Ia harus menebus uang sebesar lima belas juta rupiah agar suaminya selamat.

Kenangan tentang penculikan tidak hanya dialami Bu Rahmi. Di Mukim Rampah, saya juga bertemu Bu Lela yang memiliki kenangan pahit tentang suaminya diculik GAM tahun 1999. Banyak orang bercerita bahwa suaminya diculik karena tuduhan *cuak*. Pada masa DOM, suami Bu Lela bekerja sebagai supir truk PT Exxon Mobil. Statusnya itu membuat dirinya dicurigai kombatan sebagai *cuak*. Menurut Bu Lela, istilah *cuak* kerap digunakan untuk menghambisi orang yang tidak disenangi. Saat mengobrol dengan Bu Lela, Keumala juga menambahkan, *cuak* adalah istilah politik yang digunakan GAM untuk menyebut lawan-lawan mereka yang berkhianat. Keumala memiliki pengalaman lain dengan *cuak* lantaran almarhum suaminya yang kombatan meninggal karena informasi dari *cuak* kepada tentara. “Lha gimana GAM datang gedor pintu bilang untuk tidak diberi tahu kalau mereka ada, lalu TNI datang tanya mana GAM dan bisa ditendang kalau dijawabnya tidak tahu,” ucap Bu Lela dengan nada tinggi. Ia merasa tersudut bila suaminya dituduh *cuak* hanya karena pekerjaannya. Ia mengibaratkan hidupnya bagaikan pelanduk (Khairina, 2015). Lambat laun, Bu Lela menduga bahwa suaminya dibawa ke Bukit Tengkorak oleh GAM. Dari sanalah saya tahu bahwa Bukit Tengkorak, bisa jadi, bukan hanya ladang pembantaian tentara tetapi juga kubu sebaliknya.

B. Pengalaman perempuan dan sungai mati

Pengalaman perempuan dalam memenuhi kebutuhan air dengan kualitas air sungai yang terus menyusut hadir beriringan dengan situasi konflik yang sehari-hari mereka alami. Salah satu contohnya adalah cerita tentang Mukim Rampah dan sungai mati. Keluarga Bu Lela misalnya, harus tetap mengambil air dari sungai mati sekalipun tiba-tiba baku tembak bisa terjadi. Diantara ketegangan itu, masyarakat Buki Linteung juga berjuang di pengungsian ketika air bah membanjiri kampung mereka. Pembangunan Dam Langkahan ditandai sebagai penyebab utama banjir. Proses ganti rugi dianggap bermasalah, lantaran perempuan tidak dilibatkan sebagai pengambil keputusan. Hanya *geucik* yang menjabat saat itu saja yang tahu. Ia berhasil membangun bangunan megah dari batu setelah proses ganti rugi selesai. Sementara banyak orang di Bukit Linteung harus bertahan hidup dari bencana. Tidak ada yang berani menyampaikan protes atas ganti rugi Dam Langkahan, mereka hanya mengatakan, “Tahun 1992an mana mungkin bisa *berkotek-kotek*,” (Khairina, 2015).

Bencana mengakibatkan lahan-lahan tidak bisa ditanami tanaman musiman seperti jagung, cabai atau padi sekalipun. Sementara kondisi air, disamping mengalami pendangkalan karena banjir, memburuk karena timbunan limbah. Suatu sore, saat saya mandi di sungai mati, para perempuan yang sedang mandi di sana mengatakan bahwa airnya sedang bau. “Lumpur di bawah sungai menguap,” pungkas anak Bu Lela sembari mencuci baju di sungai. Pada saat bersamaan aku mandi di sisi kanannya, air sungai tidak berarus, sehingga ia harus bergeser memberiku tempat untuk mandi agar tidak terkena air sabun. Usai mandi, aku melihat anak Bu Lela dan Bu Lela mengisi air dalam derigen dan ember bekas cat. Aku membantunya, lantas Bu Lela mengangkat air itu di atas kepalanya dan melintasi titian kayu untuk sampai ke daratan. Sementara derigen-derigen itu dibawah oleh saya, Keumala dan anak perempuan Bu Lela.

Sehabis mandi, mereka mengeluh gatal-gatal. Hal serupa juga saya alami. Tidak jarang, para perempuan itu mengoleskan sari pati ubi di vagina untuk menghalau gatal. Bila rasa gatal sudah memuncak, tak segan mereka mengoleskan balsam ke mulut vagina mereka. Rasa gatal adalah makanan sehari-hari mereka usai mandi. “Ini (gatal red.) biasa terjadi kalau lumpur menguap,” ungkap Bu Lela. Pada malam harinya, saat aku berkunjung ke rumah Kepala Dusun, istrinya pun bercerita hal sama. Ia juga merasa gatal-gatal setelah mandi sore itu. Hingga akhirnya ia menyarankan, bila belum terbiasa, lebih baik mandi satu kali di pagi hari saat matahari belum panas.

Sekalipun mengeluh gatal dan bau, air dari sungai mati masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mencuci dan mandi. Tidak ada pilihan memang. Hanya saja, perempuan Bukit Linteung tak lagi menggunakan air itu untuk masak. Menurut Bu Lela rasa air rebusan sungai mati sudah berbau besi berkarat. “Ujung lidah pahit rasanya,” tambah anak perempuan Bu Lela. Hal itu membuatku mengamini kondisi air itu. Pengalaman menggosok gigi dengan air sungai mati meninggalkan rasa pahit di pangkal lidah. Hanya saja, akses air untuk masak hanya diperoleh di sumur satu-satunya di Bukit Linteung yang posisinya berdekatan dengan Sungai Rampah. Sungai inilah sumber persoalan utama lantaran limbah PT Exxon Mobil mengalir ke sana. Selain kondisi air yang begitu buruk. Ketika banjir, perempuan harus bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak di pengungsian dan memenuhi kebutuhan pangan. Penyakit kulit seperti kutu air adalah pengalaman rutin yang disertai infeksi saluran pernapasan, dislepsia karena menahan rasa lapar hingga depresi. Banjir yang setinggi genting rumah mengakibatkan banyak perempuan dan anak-anak depresi.

Kondisi air yang begitu buruk mengakibatkan ikan-ikan menjadi pahit dan berbau sampah. Bahkan, sekalipun ikan-ikan itu sudah dimasak dengan bumbu fermentasi kelapa, *patarana*, yang terkenal kuat rasanya bau sampah itu masih membekas. Kondisi ini mengganggu sumber protein orang kampung yang sebenarnya bisa diperoleh dari sungai mereka sendiri. Kini, sejak serangan limbah dan banjir semakin intensif, ikan-ikan tak lagi dipancing. Mereka lebih memilih penjual ikan yang datang berkeliling dari pada harus memancing ikan di sungai mati.

Cerita di Mukim Rampah juga dialami di Mukim Manggamat. Bu Ida begitu bersemangat saat menunjuk Sungai Manggamat yang berjarah kurang dari sepuluh meter dari rumahnya. Ia bertutur, saat tahun 2004 –satu tahun sebelum PT Multi Mineral Utama datang– sungai ini masih

jernih dengan ikan melimpah. “Ikan-ikannya sebesar lengan,” tambahnya. Kini, seiring dengan pembuangan limbah pertambangan emas, ikan-ikan mati bersamaan dengan air yang tiba-tiba berwarna putih. Saat PT Pinang Sejati Utama datang di tahun 2009, kondisi Sungai Manggamat makin parah. Penambangan batu PT Pinang Sejati Utama menghasilkan danau-danau bekas tambang yang airnya merembes dan mengalir ke Sungai Manggamat. Penambangan juga menyisakan erosi material yang mengalir bersamaan dengan sungai. Sungai semakin dangkal. Ketika saya datang ke Mukim Manggamat minggu lalu, air hanya sedalam mata kaki saja. Sementara saat musim penghujan, air sungai membanjiri kampung.

“Tahun 2009, saat PT Pinang Sejati Utama masuk, air (Sungai Manggamat) langsung keruh. Pernah bahkan air sungai merah bata dan kental, diikuti krikil-krikil yang berselimut tanah lempung. Sekarang perusahaan sudah tidak ada, tetapi sungai ini tidak langsung bersih,” tutur Ibu Ira kesal.⁹

Air tidak bisa lepas dari ruang perempuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan reproduksinya. Bila cerita di Mukim Rampah, air mengakibatkan gatal-gatal di vagina. Sementara di Mukim Manggamat, kondisi air di Sungai Manggamat telah mengganggu reproduksi bagi generasi selanjutnya. Anak-anak yang lahir dari rahim perempuan yang mengalami paparan limbah tinggi sehari-hari melalui aktivitas minum, mandi dan mencuci cenderung lahir dengan kemampuan motorik terganggu. Ibu Ira memiliki seorang anak berusia tiga tahun yang belum bisa berbicara dengan jelas. Bila tangan dan kakinya disentuh, terasa sangat kaku. Anak yang terlihat dengan berat badan 1,1 kilogram ini tampak kesakitan bila ingin menggerakkan tangan dan kakinya. Kata Bu Ira, anaknya menjadi demikian setelah mengalami kejang hebat di usia satu tahun.¹⁰

Pengalaman Bu Ira juga dialami perempuan lain, Bu Reki yang hamil pada saat suaminya bekerja di *blender* pertambangan emas. Anak Bu Reki berumur dua tahun, dan mengalami hal serupa dengan anak Bu Ira. Umur kedua bocah ini tidak jauh. Mata anak Bu Reki sama seperti anak Bu Ira, kosong dan tidak merespon gerakan subyek yang dilihatnya. Menurut Bu Reki, anaknya tidak buta, hanya kesulitan memindahkan bola mata saja. Hingga usia dua tahun, ia juga belum bisa berbicara. Tangan dan kakinya terlihat kaku, tidak bergerak luwes seperti anak-anak lain seusianya.

Bu Ira menduga-duga dan merasa berdosa anaknya menjadi seperti itu lantaran saat hamil ia mengonsumsi air di Sungai Manggamat. Sementara Bu Rahmi, tetangga Bu Reki, menduga bila anak Bu Reki terlahir sama seperti Bu Ira lantaran tubuh suaminya sudah terpapar merkuri dengan intensitas tinggi. Cerita ini tentu bukan kebetulan-kebetulan semata. Air begitu dekat dengan sistem reproduksi, vagina dan rahim. Cerita Bu Reki dan Bu Ira, barangkali juga dialami oleh Bu Lela serta cucu dan anaknya yang selalu gatal-gatal usai mandi di sungai. Gatal dan pengalaman Bu Reki dan Bu Ira bisa menjadi penanda ambang krisis yang begitu akut.

⁹ Khairina, 2015: tidak dipublikasikan.

¹⁰ Khairina, 2015: tidak dipublikasikan.

C. Pengalaman perempuan melawan keputusan politik KPA

Di bagian ini, saya ingin menceritakan pengalaman perempuan di Mukim Manggamat saat menentang keputusan politik Komite Peralihan Aceh untuk menerima pembagian keuntungan PT Pinang Sejati Utama. Seperti cerita tentang sungai mati, Sungai Manggamat telah kehilangan fungsinya setelah pertambangan emas dan biji besi massif di sana. Saya teringat Bu Citra yang merasa kesal karena banjir menjadi begitu sering datang ke rumahnya sejak perusahaan datang. Di sela menggoreng kopi untuk anak perempuannya, ia menyindir rumah besar yang ada di depan rumahnya. “Rumah saya gak kaya punya KPA, bagus-bagus,” keluhnya. Ia pun bercerita bahwa orang-orang yang rumahnya bagus-bagus, bertembok rapi dengan warna terang, biasanya memiliki tanah di sekitar PT Pinang Sejati Utama. Mereka menerima pembagian keuntungan setiap dua sampai tiga bulan sekali. Masyarakat di sekitar konsesi pertambangan menyebutnya sebagai pembagian keuntungan per *pengapalan*-pengiriman kapal material biji besi ke pelabuhan.

Saat perusahaan datang di tahun 2009, *geucik* Simpang Dua memutuskan tidak menerima uang pembebasan lahan bagi warganya. Ia menawarkan mekanisme koperasi agar mampu mendapatkan keuntungan terus menerus dari aktivitas penambangan. Koperasi Tiga Manggis, demikian nama lembaga yang beranggotakan para pemilik tanah di wilayah keruk PT Pinang Sejati Utama. Koperasi ini beranggotakan 75 orang, masing-masing mendapatkan pembagian hasil berbeda tergantung pada luasan lahan dan tegakan pohon kemiri, pinang dan pala di atasnya. Bila tanah yang ditambang produktif, koperasi bisa mendapatkan bagi hasil 20.000/ton pengapalan. Setiap pengapalan, perusahaan bisa melepaskan dua sampai tiga kapal besar yang masing-masing bermuatan 50.000 ton. Sementara KPA, sebagai dana keamanan, mendapatkan jatah 2000/ton. Maka bisa dibayangkan, berapa jumlah uang yang mengalir di kampung setiap dua sampai tiga bulan pengapalan. Keuntungan besar inilah yang membuat para eks kombatan anggota koperasi menanti-nanti perusahaan kembali. Seperti dikeluhkan oleh Pak Langit, “Perusahaan hanya janji-janji saja mau usaha lagi di sini (Simpang Dua), padahal tanah saya belum dikeruk.”

Tidak sedikit yang merasa gerah dengan laju kekayaan anggota Koperasi Tiga Manggis. Bu Citra misalnya, ia merasa bangga karena pernah menolak uang kompensasi debu yang diakibatkan oleh truk-truk perusahaan. “Setiap *pengapalan*, mereka akan memberi 500.000-2000.000 tergantung keuntungan yang mereka peroleh saat itu,” tambahnya.

Kecenderungan para eks kombatan yang menggunakan KPA untuk mendukung perusahaan membuat ketegangan di Mukim Manggamat diam-diam membesar. Ketegangan semakin menjadi-jadi saat masyarakat di hilir Sungai Manggamat memilih untuk memblokade satu-satunya akses jalan perusahaan.

Para perempuan, seperti Bu Rahmi dan Bu Rayun, ikut serta dalam memblokade jalan. Bu Siti pun pernah bertengkar dengan suaminya karena ikut kawan-kawan perempuan lainnya memblokade truk perusahaan. Padahal pembagian keuntungan sangat bergantung pada laju hilir-mudik truk-truk ke pelabuhan. Bu Siti pun membantah suaminya, “Mungkin rejekinya tidak ada di PT Pinang Sejati Utama.” Pada Januari 2011, perempuan-perempuan di hilir Sungai

Manggamat melakukan pemblokiran jalan. Kursi-kursi dan bangku diletakkan di tengah jalan agar truk-truk perusahaan bisa berhenti. Pada waktu itu, perusahaan mencoba untuk bernegosiasi dengan pimpinan demo dengan menjanjikan gaji 6.000.000 tiap bulan bila mau membubarkan para pendemo. “Kalau saya menerima itu, sama halnya dengan bunuh diri,” ungkap suami Bu Rayun yang waktu itu memimpin demonstrasi.

Pada 25 Januari 2011, sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan PT Pinang Sejati Utama melakukan aksi massa ke DPRK Kabupaten Aceh Utara. Pada waktu itu, keinginan warga bersambut dengan kehendak politik dari bupati yang baru dilantik hingga akhirnya perusahaan pun angkat kaki dari Mukim Manggamat. Namun sebelumnya, 21 warga Mukim Manggamat pernah ditangkap oleh kepolisian lantaran aksi pembakaran mobil perusahaan. Aksi tersebut disambut tidak sekedar dengan penangkapan kepolisian, melainkan juga pembakaran rumah Bu Rahmi dan suaminya.

Tindakan pembakaran yang sama juga dilakukan kepada pos penjagaan PT Beri Multi Utama yang datang setelah dua perusahaan sebelumnya tutup. Perusahaan ini tidak hanya membayar keamanan dari KPA dengan janji yang sama dengan PT Pinang Sejati Utama, melainkan juga menyewa tentara Yonif 115 Macan Leuser. Cara-cara sama dari PT Exxon Mobil di Mukim Rampah dihadirkan kembali di sini.

KESIMPULAN

Wajah krisis di Aceh Utara dan Aceh Selatan tidak bisa lepas dari rusaknya sungai yang dipengaruhi oleh politik teritorialisasi guna memperluas rejim ekstraksi pertambangan. Konflik dan kejahatan negara terhadap masyarakat Aceh semula dipengaruhi penjagaan tentara terhadap ragam konsesi sumber daya alam strategis. Ingatan masyarakat terhadap kekerasan tidak bisa lepas dari degradasi lingkungan yang berlangsung cepat. Situs-situs kuburan masal bersanding erat dengan konsesi-konsesi besar yang mendukung aliran kapital ke pusat. Pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Kabupaten Aceh Utara menjadi legitimasi aparat berlaku semena-mena hingga menyisakan trauma sampai saat ini.

Status Daerah Operasi Militer memang telah dicabut tahun 1999, namun status tersebut makin ditambah dengan memberi status Darurat Sipil diikuti Daerah Militer. Ragam status militer menyisakan trauma panjang bagi para perempuan. Saat konflik makin panas, perempuan harus menghadapi tekanan dan intimidasi karena sikap politik suami dan keluarganya. Sementara di sisi lain, mereka harus memenuhi kebutuhan air dan pangan diantara ketidakpastian bencana akibat praktik teritorialisasi negara. Banjir menjadi wajah umum saat konflik berlangsung.

Situasi semasa konflik tidak banyak berubah setelah kesepakatan perdamaian ditandatangani. Para kombatan terlihat dalam pengorganisasian KPA agar bisa kembali ke masyarakat. Sementara itu, tentara-tentara ditarik kembali ke barak. Terjadi penyerahan senjata GAM yang menandai baku tembak telah usai. Namun, rejim ekstraksi sumber daya pasca konflik tidak banyak berubah. Laju pendapatan daerah dari bupati terpilih masih berpangkal dari pemberian konsesi-konsesi kepada perusahaan. Didalam hal ini, KPA yang semula terlibat dalam kubu ekstrim dengan negara justru terlihat proses pengamanan laju kapital ekstraktif. Mereka

menjadi baris-baris keamanan asset-aset perusahaan. Mereka pula yang mampu berstrategi untuk terlibat dalam putaran keuntungan. Cerita tentang KPA ini, di satu sisi justru menjadi bukti bagi kompleksitas perlawanan dari bawah. Seringkali kita melihat bahwa “orang-orang lokal” selalu terlibat dalam resistensi. Namun sebenarnya, apa yang terjadi di bawah lebih beragam dan kompleks (Hall dkk 2015). Cerita ini menghadirkan kerumitan tersebut. Cerita tentang Mukim Rampah menunjukkan bahwa praktik teritorialisasi dilakukan dengan merampas tanah yang dianggap sebagai asset strategis negara, tanpa melibatkan masyarakat disekitarnya sebagai tenaga kerja. Tampilan demikian, menurut Li (2011) lebih mudah menimbulkan konflik. Sementara, situasi pasca konflik, para eks kombatan yang sudah terorganisir dalam KPA menjadi lebih mudah menentukan sikapnya didepan perusahaan. Dengan demikian, mereka juga lebih mudah dilibatkan dalam perluasan kapital entah dalam sektor pengamanan lokal atau bagi hasil.

Daftar Pustaka

- Hall, Ruth., Marc Edelman, Saturnino M Borrás, Ian Scoones, Ben White dan Wendy Wolford. 2015. “Resistance, acquiescence or incorporation? An introduction to land grabbing and political reactions ‘from below’” dalam *The Journal of Peasant Studies*, 42:3-4, 467-488
- Julia., Ben White. 2012. “Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan” dalam *The Journal of Peasant Studies*, 39: 3-4, 995-1016.
- Kell, Tim. 1995. *The Roots of Acehnese Rebellion*. New York: Cornell Modern Indonesia Project
- Khairina, Wina. 2015. *Menggamat, Sumur Hijau yang Terkoyak*. Bogor: Tidak diterbitkan
- Khairina, Wina. 2015. *Pembangunan Berbuah Petaka*. Bogor: Tidak diterbitkan
- Kontras. 2006. *Aceh Damai dengan Keadilan?* Jakarta: Kontras.
- Laporan Tahunan Kebenaran KKPK. 2014. *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas*. Jakarta: Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran.
- Li, Tania M. 2011. “Centering Labor in the Land Grab Debate” dalam *The Journal of Peasant Studies*, 38: 2. 281-298.